

**DUKUNG PEMERINTAH TINGKATKAN KESEHATAN IBU DAN ANAK, RAPP
DORONG PENURUNAN STUNTING DI WILAYAH OPERASIONAL**



Sumber gambar:

https://www.cakaplah.com/assets/news/22052025/cakaplahcom_wtnpq_123611.jpg

Upaya peningkatan layanan kesehatan menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia.

Dalam mendukung agenda tersebut, PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), unit operasional APRIL Group, terus menunjukkan komitmennya melalui program penguatan layanan kesehatan ibu dan anak di berbagai desa dampingan di Provinsi Riau.

Program ini merupakan bentuk dukungan perusahaan untuk ikut serta mengatasi permasalahan kesehatan yang berdampak jangka panjang terhadap generasi masa depan. RAPP secara aktif terlibat dalam program percepatan penurunan prevalensi stunting, khususnya di wilayah operasional perusahaan yang tersebar di Kabupaten Pelalawan, Siak, Kuantan Singingi, Kampar, dan Kepulauan Meranti.

Sepanjang tahun 2024, sebanyak 590 kader dan 60 tenaga kesehatan (Nakes) dari 309 posyandu telah mendapatkan pelatihan dan tersebar di 133 desa di 5 kabupaten di Provinsi Riau.

Selain itu RAPP juga memastikan kecukupan gizi anak dengan diberikannya pemberian paket nutrisi berupa makanan tambahan (PMT) untuk 16.148 balita dan ibu hamil.

Kegiatan yang dijalankan meliputi penguatan kelembagaan Posyandu, peningkatan kapasitas kader, edukasi kesehatan yang menyeluruh kepada orang tua balita, penguatan sistem layanan kesehatan anak usia dini sejak dalam kandungan, hingga masa balita, serta pemberdayaan keluarga dalam pengasuhan anak.

Berdasarkan data terbaru yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan, angka prevalensi stunting di Provinsi Riau tahun 2023 berada di angka 13,6 persen. Angka ini jauh di bawah rata-rata angka stunting nasional yakni 21,5%. Bahkan pada awal tahun 2024 angka stunting di Pelalawan mengalami penurunan menjadi 11,2%.

Program Kesehatan Ibu dan Anak yang dijalankan RAPP tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan, tetapi mengedepankan pendekatan sistematis dan kolaboratif. RAPP percaya bahwa perbaikan sistem kesehatan masyarakat hanya dapat dicapai jika dilakukan bersama-sama dengan para pemangku kepentingan.

“Kami berkomitmen untuk mendukung upaya pemerintah dalam menurunkan angka stunting melalui penguatan kapasitas kelembagaan posyandu. Selain itu kami mendorong perubahan perilaku masyarakat di tingkat keluarga agar pengasuhan anak menjadi lebih sehat lewat penyampaian edukasi kesehatan,” ujar Ferdinand Leohansen Simatupang, Head of Community Development (CD) RAPP belum lama ini.

Leo menambahkan bahwa pihaknya menargetkan penurunan angka stunting hingga 50 persen di desa-desa binaan sesuai yang tertuang pada komitmen APRIL2030. Target tersebut diyakini dapat dicapai dengan sinergi dan kolaborasi kuat antara sektor swasta, pemerintah, dan masyarakat lokal.

“Setiap anak berhak untuk tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Karena itu, kami menempatkan program ini sebagai prioritas sosial perusahaan yang juga menjadi bagian dari kontribusi kami terhadap pembangunan berkelanjutan,” lanjutnya.

Program ini juga merupakan implementasi dari komitmen APRIL2030 pada pilar kemajuan inklusif, sebagai bentuk komitmen keberlanjutan yang diluncurkan oleh APRIL Group. Kemajuan inklusif berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan penghidupan yang layak.

Melalui APRIL2030, perusahaan tidak hanya fokus pada aspek lingkungan, tetapi juga pada pembangunan sosial masyarakat sekitar operasional. Inisiatif kesehatan ibu dan anak merupakan bagian dari target sosial yang ditetapkan untuk menciptakan komunitas yang tangguh dan berdaya.

Asisten I Pemerintah Kabupaten Pelalawan, Zulkifli mengapresiasi langkah RAPP dalam mendukung program nasional percepatan penurunan stunting. Menurutnya, keterlibatan dunia usaha dalam sektor kesehatan semakin diperlukan untuk memperkuat layanan dasar di tingkat desa.

“RAPP telah berkontribusi banyak terhadap Kabupaten Pelalawan termasuk dalam hal penurunan stunting. Tema pembangunan tahun 2025 Kabupaten Pelalawan adalah meningkatkan pelayanan dasar sumber manusia dan infrastruktur untuk penguatan ekonomi daerah,” ujarnya.

Di beberapa desa dampingan, program ini telah menunjukkan dampak positif. Kegiatan rutin posyandu kembali aktif dengan dukungan tenaga kader yang dilatih, sementara para ibu mulai lebih memahami pentingnya pemenuhan gizi anak dan praktik pengasuhan yang sehat. Anak-anak juga mendapatkan pemantauan tumbuh kembang secara berkala.

Dengan pendekatan yang berkelanjutan dan berbasis komunitas, RAPP berharap dapat berkontribusi dalam membangun generasi yang sehat, cerdas, dan siap menghadapi masa depan. Inisiatif ini bukan hanya tentang kesehatan fisik semata, melainkan juga bagian dari investasi sosial jangka panjang yang mendukung kemajuan daerah secara menyeluruh.

Di tahun 2024, Direktur PT RAPP Mulia Nauli menerima penghargaan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), pada perayaan Hari Keluarga Nasional (Harganas) yang berlangsung di Semarang, Jawa Tengah, pada Jumat (28/6/2024).

Mulia Nauli menerima penghargaan Dharma Karya Kencana (DKK) atas prestasi dan komitmen perusahaan dalam penurunan stunting melalui program Community Development (CD) dan Corporate Social Responsibility (CSR) di lima kabupaten operasional RAPP.

Penghargaan karena ikut mendorong mewujudkan keluarga berkualitas menuju Indonesia Emas ini diserahkan langsung oleh Kepala BKKBN RI saat itu.

Mulia Nauli mengungkapkan rasa syukur atas penghargaan yang diberikan oleh BKKBN atas komitmen RAPP selama ini dalam upaya mendukung pemerintah menekan angka stunting di Riau.

"Kita bangga, pada acara Harganas kita menerima penghargaan karena peran aktif kita dalam penurunan stunting. Dan yang terpenting, komitmen perusahaan untuk mendukung target penurunan stunting," ujar Mulia Nauli, pada Sabtu (29/6/2024).

Sumber berita:

1. <https://www.cakaplah.com/berita/baca/123611/2025/05/22/dukung-pemerintah-tingkatkan-kesehatan-ibu-dan-anak-rapp-dorong-penurunan-stunting-di-wilayah#sthash.EhhPLnkO.dpbs>, “Dukung Pemerintah Tingkatkan Kesehatan Ibu dan Anak, RAPP Dorong Penurunan Stunting di Wilayah Operasional”, 22 Mei 2025; dan
2. <https://ftp.riau24.com/berita/baca/1747976208-dukung-pemerintah-tingkatkan-kesehatan-ibu-dan-anak-rapp-dorong-penurunan-stunting-di-wilayah-operasional>, “Dukung Pemerintah Tingkatkan Kesehatan Ibu dan Anak, RAPP Dorong Penurunan Stunting di Wilayah Operasional”, 23 Mei 2025.

Catatan:

Dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, pengertian *stunting* yaitu gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan. Sedangkan Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa.

Pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024, di informasikan bahwa kegiatan prioritas rencana aksi meliputi:

- a) penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;
- b) pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;
- c) pendampingan semua calon pengantin/calon pasangan usia subur;
- d) surveilans keluarga berisiko *Stunting*;
- e) audit kasus *Stunting*;
- f) perencanaan dan penganggaran;
- g) pengawasan dan pembinaan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*; dan
- h) Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 6 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 menginformasikan bahwa terdapat 5 (lima) pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* yaitu:

- 1) Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
- 2) Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
- 3) Peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
- 4) Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
- 5) Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.

Bangga Kencana merupakan singkatan dari Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana. Program Bangga Kencana berfokus untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Salah satu fokus dari program Bangga Kencana, yaitu penurunan *Stunting* yang juga menjadi program strategis nasional yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia (RI). Terdapat 4 (empat) kebijakan program Bangga Kencana yaitu:

- 1) Memperkuat sistem informasi keluarga yang terintegrasi berupa peningkatan kualitas dan pemanfaatan data program bangga kencana berbasis teknologi informasi di seluruh tingkatan wilayah;
- 2) Meningkatkan advokasi dan penggerakan program bangga kencana sesuai dengan karakteristik wilayah dan segmentasi sasaran;
- 3) Meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) yang komperhensif berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran; dan
- 4) Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik dan integratif sesuai siklus hidup, serta menguatkan pembentukan karakter di keluarga.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau